

► Book Review

Judul Buku : *Public Sector Auditing Reform and Accountability in Indonesia Theory, Concept, Practice and Implementation in Public Policy and Administrative Sciences*

Penulis : Septiana Dwiputrianti, SE, M.Com. (Hons), PhD

Penerbit : LAP Lambert Academic Publishing GmbH and Co.KG, Germany.

Tebal Halaman : 277 halaman

ISBN : 978-3-8465-4012-1

Copyright : ©2011 by author

Website : <https://www.morebooks.de/store/gb/book/public-sector-auditing-reform-and-accountability-in-indonesia/isbn/978-3-8465-4012-1>

Reviewer : Prof. Dr. Mustopadidjaja AR, MPA.



Pepatah bangsa kita mengungkap suatu wisdom dengan untaian kata “sejarah adalah guru terbaik” bagi setiap anak bangsa atau pun suatu institusi untuk bisa turut memberi warna dan makna positif bagi capaian kinerja perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam bernegara. Sejarah peradaban bangsa kita dan bangsa-bangsa lain juga memberi pelajaran bahwa “guru terbaik” adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya secara tepat dan proporsional dalam menjawab kompleksitas dan dinamika permasalahan dan tantangan sejarah yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu. Pada hemat saya muatan kedua kalimat itu, merupakan pesan dari buku yang secara santun tidak diungkap oleh penulisnya, Ibu Dr. Septiana Dwiputrianti, berjudul: *Public Sector Auditing Reform and Accountability in Indonesia, Theory, Concept, Practice and Implementation in Public Policy and Administrative Science*.

Penulis buku tersebut mengungkap secara apik lembaran sejarah kehadiran, aktivitas, dan kinerja BPK sebagai lembaga tinggi negara yang berperan dalam melakukan auditing dan dapat turut mempengaruhi terwujudnya *public accountability*, melalui laporan auditnya sendiri yang secara analitis dilakukan melalui dua pendekatan pemeriksaan, yaitu *financial and performance audit*. Kurun waktu sejarah audit yang penulis cermati meliputi dua era sejarah sepanjang Indonesia Merdeka, yaitu Era Sebelum Reformasi Audit (1945-2000); dan Era Sesudah Reformasi Audit, 2001-2009; diperkaya dengan gambaran singkat sejarah auditing jaman kolonial Belanda.

Kesadaran akan pentingnya auditing bagi tegaknya akuntabilitas penyelenggaraan negara dan pembangunan Indonesia, bukan saja tampak

dari eksisnya BPK dengan peran dan aktivitasnya sebagai lembaga audit eksternal yang sudah ditetapkan dalam lima konstitusi yang pernah berlaku¹, tetapi juga dari eksisnya lembaga dan berkembangnya praktik audit internal, tergambar secara sistematis dari perkembangan kedua era sejarah auditing pada buku ini. Namun tampak disadari bahwa tegaknya pemerintahan yang bersih dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya tergantung pada berdirinya lembaga-lembaga audit. Sebab disamping adanya kejelasan lingkup dan saling hubungan tugas antara lembaga audit internal dan eksternal, masih diperlukan berbagai persyaratan lain bagi terselenggaranya audit yang baik dan pengawasan yang efektif.

Pertanyaan yang timbul terkait dengan terselenggaranya audit yang baik adalah: apakah persyaratan-persyaratan untuk itu eksis (dipenuhi) dalam sistem dan proses auditing selama sejarah Indonesia Merdeka? Permasalahan tersebut dijawab penulis dengan meneliti dan mengungkap aspek-aspek auditing pada kedua kurun waktu sejarah audit secara lmgkap dan rinci, termasuk evolusi kelembagaan audit dan evaluasi informasi laporan hasil audit, standar audit yang digunakan, serta etika dan integritas yang melekat dalam sistem kelembagaan dan perilaku para auditor yang berperan di dalamnya. Selain itu mendapatkan perhatian pula perkembangan faktor *human capital*, ketersediaan anggaran, dan peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam proses dan pelaporan kinerja auditing; serta

1. Kelima konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu adalah UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD Sementara RI 1950, UUD 1945 (1959-2002), dan UUD Negara RI Hasil Amandemen (2002-Sekarang).

masalah tindak lanjut hasil audit tersebut. Semua itu semakin melengkapi gambaran komprehensif dan detail dari sistem, proses, dan hasil auditing khususnya dari BPK, disertai perbedaan, perubahan, dan kemajuan yang dialami dalam Era 1945-2000, dan Era 2001-2009.

Sehubungan dengan persyaratan terselenggaranya pengawasan yang efektif; saya ingin mencatat dimensi lain yang tersesirat dalam buku karya Dr. Septiana Dwiputrianti ini, yaitu adanya pergeseran paradigma yang tersurat sebagai hal yang terjadi dalam sistem auditing yaitu dari yang hanya fokus hanya pada jenis *financial audit* (Era 1945-2000) ke jenis audit lainnya selain *financial audit*, yaitu dengan jenis *performance audit* (Era 2001-2009). Hal tersebut adalah seiring dengan pergeseran paradigma yang di bidang administrasi negara dan pengelolaan keuangan negara yang semakin menaruh perhatian besar pada akuntabilitas capaian kinerja, dengan berbagai implikasinya pada kebijakan-kebijakan publik serta sistem regulasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut berlangsung menyertai genderang perjuangan bangsa untuk mengaktualisasikan nilai dan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean government dan good governance*) dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, sejak Era Audit Kedua (2001-2009), hingga dewasa ini dan di masa-masa yang akan datang.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara di setiap negara hukum yang demokratis, pengawasan merupakan fungsi hakiki dari lembaga legislatif (DPR). Di Indonesia, pengawasan secara konstitusional oleh para *founding fathers* NKRI, dibedakan dan dipisahkan kewenangan dan pelaksanaannya dengan fungsi auditif, dan secara kelembagaan ditetapkan menjadi tanggung jawab BPK. Selain itu, BPK diwajibkan menyerahkan hasil auditnya kepada DPR dan kepada K/L yang menjadi objek pemeriksaan ataupun lembaga Penegak Hukum, untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan sesuai permasalahan dan kewenangan masing-masing. Adanya saling hubungan antar kewenangan lembaga legislatif dan auditif dalam pengawasan, mengundang dimensi kelembagaan yang lebih dalam dan jelas mengenai makna yang terkandung dalam pengertian “dukungan” dari dua lembaga yang sederajat yang eksis dalam sistem konstitusi kita, namun berbeda tugas dan fungsinya.

Dalam hubungan itu, pengawasan yang efektif tidak hanya membutuhkan sistem, proses, dan hasil audit yang solid, tetapi juga konsensus, komitmen, integritas, dan profesionalitas segenap *stakeholders* yang bergerak di bidang pengawasan, dan bidang serta lembaga-lembaga lainnya yang merupakan pilar-pilar bagi tegaknya *clean government* dan terwujudnya *good governance*. *Mind set* dan *cultural set* seperti itulah yang agaknya bisa berkembang, dengan membaca karya yang cukup fantastis dan bermakna bagi segenap komponen bangsa yang ingin meningkatkan kontribusinya bagi tegaknya akuntabilitas capaian kinerja perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia Merdeka di seluruh nusantara ini.

Buku ini memberikan informasi mengenai *A Comprehensive and Detailed Road Map* untuk Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Bangsa secara Konstitusional dan Profesional. Walaupun buku ini belum mendapatkan versi Bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan, namun bahasa Inggris yang digunakan terasa nyaman, mengalir, dan mudah dipahami. Pokoknya, tidak rugi membaca dan menggunakan buku ini sebagai referensi, apalagi, topik ini masih jarang ada di pasaran.

Penulis adalah Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA LAN RI) dalam bidang Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik, serta mantan Kepala LAN pada tahun 1998-2003.

Prof. Dr. Mustopadidjaja AR, MPA.